



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA KOMISI IV DPR RI
RESES MASA PERSIDANGAN V TAHUN SIDANG 2022-2023
KE PROVINSI JAWA TENGAH**

*

**

**

*

JAKARTA 2023



LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA KOMISI IV DPR RI
RESES MASA PERSIDANGAN V TAHUN SIDANG 2022-2023
KE PROVINSI JAWA TENGAH

I. PENDAHULUAN

1. DASAR KUNJUNGAN KERJA

Dasar hukum yang digunakan untuk melaksanakan Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI Reses Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022-2023 ke Provinsi Jawa Tengah antara lain:

1. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib:
 - a. Pasal 59 ayat (4) butir d: Tugas komisi dalam bidang pengawasan adalah melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah.
 - b. Pasal 59 ayat (5) butir f: Komisi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dapat mengadakan kunjungan kerja.
2. Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah DPR RI tanggal 5 Juli 2023; serta
3. Keputusan Rapat Intern Komisi IV DPR RI tanggal 17 Mei 2023.

2. SUSUNAN TIM

Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI Reses Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022-2023 ke Provinsi Jawa Tengah dipimpin oleh Dr. Anggia Erma Rini, M.K.M (Wakil Ketua Komisi IV/F-PKB) dan diikuti para Anggota Komisi IV DPR RI.

3. WAKTU DAN TEMPAT

Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI Reses Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022-2023 ke Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan pada tanggal 17-21 Juli 2023 dan bertempat di Kabupaten Demak dan Kota Semarang.

4. LOKASI KUNJUNGAN KERJA

Lokasi yang menjadi peninjauan Komisi IV DPR RI di Provinsi Jawa Tengah, diantaranya:

1. Lahan kedelai Desa Banjarsari Kec. Gajah Kab. Demak;
2. Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak, Desa Purworejo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak;
3. Desa Bedono, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak; serta
4. Pasar Karang Ayu, Kelurahan Karangayu, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang.

5. MAKSUD DAN TUJUAN

Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI Reses Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022-2023 ke Provinsi Jawa Tengah adalah untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah di bidang Pertanian dan Pangan, menyerap aspirasi dari masyarakat di bidang Kelautan dan Perikanan, serta Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Adapun maksud dan tujuan Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI secara rinci adalah:

- a. Mendengarkan penjelasan, berdialog, dan mendapatkan masukan langsung dari Pemerintah Daerah, instansi terkait, masyarakat, serta stakeholder di bidang kelautan dan perikanan, lingkungan hidup dan kehutanan, serta pertanian, sehubungan dengan fungsi pengawasan Komisi IV DPR RI di Provinsi Jawa Tengah;
- b. Mendapatkan informasi secara langsung terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengembangan lahan kedelai serta pemanfaatan Biosaka untuk pertumbuhan tanaman kedelai;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pengembangan lahan kedelai yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian di Desa Banjarsari Kec. Gajah Kab. Demak;
- d. Mendapatkan informasi secara langsung terkait dengan permasalahan sedimentasi yang cukup tinggi dan surutnya air laut di perairan Morodemak;
- e. Mendapatkan informasi secara langsung terkait dengan kondisi abrasi dan banjir rob di Desa Bedono; serta

- f. Menyerap aspirasi dari masyarakat dan *stakeholder* dalam rangka perbaikan kinerja Pemerintah dalam menjalankan program dan kegiatan.

6. GAMBARAN UMUM

a. Lahan Kedelai Desa Banjarsari Kec. Gajah Kab. Demak

Pangan merupakan kebutuhan yang sangat vital dimana ketersediaannya wajib dijamin oleh Negara. Pangan menjadi sangat krusial karena memiliki peran strategis sebagai kekuatan Negara. Adapun dalam pemenuhannya, Negara mampu menghasilkan berbagai pangan lokal yang beraneka ragam dan mampu mencukupi kebutuhan warganya. Saat ini, jumlah kebutuhan dan ketersediaan pangan secara nasional tidak seimbang. Pemerintah terpaksa melakukan impor pangan dalam memenuhi kebutuhan dan guna menyetabilkan harga pangan. Beras, kedelai, daging, bawang putih, dan gula merupakan beberapa komoditas strategis yang rutin diimpor oleh Pemerintah dari berbagai negara setiap tahunnya.

Keterbatasan dan tingginya harga pupuk, adanya kenaikan biaya distribusi, tingginya kebutuhan pangan, munculnya berbagai penyakit hewan, serta rendahnya kualitas dan kuantitas pangan merupakan serangkaian permasalahan yang saat ini harus dituntaskan oleh Negara. Kedelai merupakan salah satu contoh komoditas strategis yang keberadaannya sangat dinantikan oleh masyarakat namun pemenuhannya masih bergantung pada komoditas impor. Setiap tahun Pemerintah harus melakukan impor kedelai karena Negara hanya mampu memproduksi sekitar 25-30% dari kebutuhan Nasional.

Adanya lonjakan harga kedelai dunia menjadi isu yang sangat sensitif karena mampu mempengaruhi harga kedelai impor. Komisi IV DPR RI dalam pertemuannya dengan Pemerintah selalu mendesak dan mendukung Pemerintah untuk konsisten mengembangkan komoditas kedelai agar dapat mengurangi ketergantungan impor dari negara lain. Dirjen Tanaman Pangan juga telah berkomitmen akan melakukan penambahan areal lahan kedelai di Tahun 2023 dan di tahun yang sama, Komisi IV DPR RI telah menyetujui anggaran pengembangan kedelai Nasional yaitu senilai 483 miliar yang digunakan untuk 250 ha lahan.

Kabupaten Demak merupakan salah satu daerah yang akan disiapkan sebagai salah satu sentra kedelai di areal persawahan pascapanen padi. Oleh karena itu, Komisi IV DPR RI menyempatkan hadir di Desa Banjarsari Kec. Gajah Kab. Demak guna meninjau pengembangan program Pemerintah dalam rangka peningkatan produksi kedelai di Tahun 2023.

b. Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak

Ekosistem muara merupakan perairan semi tertutup yang berada di bagian hilir sungai dan masih berhubungan dengan daerah daratan dan lautan, sehingga memungkinkan terjadinya percampuran antara air tawar dan air laut. Muara sungai Tuntang Morodemak merupakan salah satu muara yang pemanfaatannya dilakukan secara intensif, seperti sebagai jalur lalu lintas kapal. Dampak yang diperoleh dari tingginya aktivitas tersebut dapat mempengaruhi kondisi ekologi, sehingga akan memberikan sumbangan terbesar dari proses sedimentasi di muara dan pesisir pantai.

Morodemak adalah kawasan pesisir dan muara dimana daerah tersebut merupakan tempat mata pencaharian utama bagi masyarakat nelayan. Di daerah ini terdapat Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak yang merupakan tempat berlabuhnya kapal nelayan dan menjadi pusat aktivitas pelelangan ikan. Kegiatan perikanan laut sampai dengan saat ini masih memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB perikanan, sehingga menjadi kegiatan andalan dalam menggerakkan perekonomian di bidang perikanan.

Saat ini kawasan pesisir dan muara morodemak menghadapi permasalahan akumulasi sedimen tahunan yang terbentuk cenderung semakin meningkat dengan semakin dangkalnya alur sungai, sehingga menyebabkan alur pelayaran untuk kapal-kapal nelayan yang melewati muara sungai Tuntang Morodemak menjadi terganggu seperti menghalangi dan menyulitkan nelayan untuk keluar masuk, banyak terjadi kecelakaan, kapal tenggelam atau menabrak karang yang banyak pasir laut atau sedimentasi. Selain itu sedimen yang terendapkan di dasar pesisir dan muara juga sangat mengganggu kehidupan organisme di dalam air.

c. Desa Bedono, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak

Pesisir merupakan daerah peralihan yang terbentuk dari berbagai proses geomorfologi yang terjadi di daratan dan laut. Lingkungan pesisir yang tidak seimbang akan memunculkan beberapa permasalahan. Di pantai utara Jawa Tengah luasan abrasi telah mencapai lebih dari 5.000 hektar yang tersebar di 10 kabupaten kota. Kerusakan parah terjadi di sepanjang pesisir pantai di Kabupaten Jepara, Kabupaten Rembang, Kabupaten Demak, Kota Semarang, Kabupaten Brebes, dan Kabupaten Kendal. Menurunnya kualitas dan kuantitas ekosistem mangrove telah mengakibatkan dampak yang sangat mengkhawatirkan, seperti abrasi yang meningkat, penurunan tangkapan perikanan pantai, intrusi air laut yang semakin jauh ke arah darat, dan lainnya. Pesisir pantai utara di Provinsi Jawa Tengah mengalami abrasi sekitar 7-10 m per tahun akibat rusaknya jalur hijau mangrove.

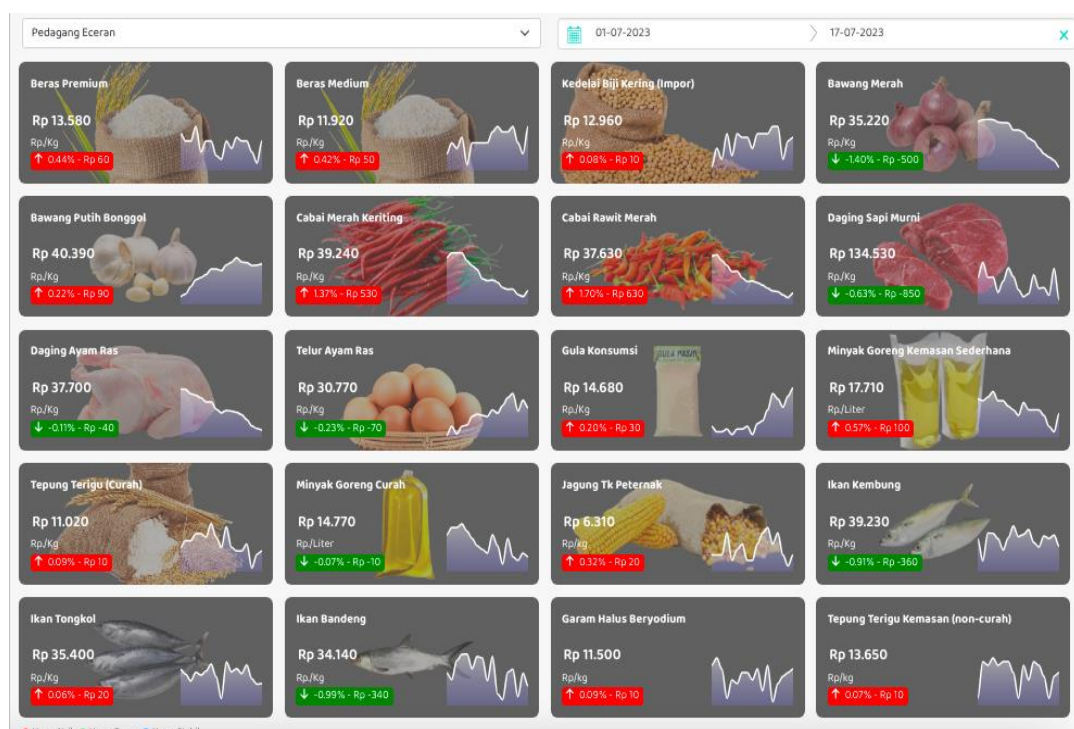
Kabupaten Demak adalah salah satu wilayah kabupaten pesisir di Jawa Tengah yang terkena dampak abrasi cukup parah. Kabupaten Demak yang terkena banjir rob adalah 17 desa yang tersebar di 3 kecamatan yakni Kecamatan Sayung, Kecamatan Bonang, dan Kecamatan Karangtengah. Sejumlah 10 desa dari 17 desa yang terdampak rob di Kabupaten Demak merupakan bagian administratif dari Kecamatan Sayung. Desa yang terjadi bencana rob di Kecamatan Sayung adalah Desa Sriwulan, Bedono, Purwosari, Gemulak, Sidogemah, Tugu, Timbulsloko, Sidorejo, Surodadi dan Banjarsari, sedangkan di Kecamatan Karangtengah desa yang paling parah mengalami abrasi adalah Desa Tambak Bulusan.

Berbagai upaya penanggulangan erosi pantai telah dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun swasta, di antaranya dengan program rehabilitasi mangrove. Upaya rehabilitasi mangrove berhasil meningkatkan tutupan mangrove di pesisir Sayung. Pada tahun 2009, mangrove hanya ditemukan di 4 desa pesisir Sayung dengan luasan total sebesar lebih dari 37 ha. Pada tahun 2019 mangrove terdistribusi pada 6 desa dengan total luasan lebih dari 225 ha. Peningkatan luasan mangrove mengindikasikan suksesnya program rehabilitasi. Pemprov Jateng juga membangun Tol Semarang-Demak yang sekaligus berfungsi sebagai tanggul penahan rob. Proyek infrastruktur yang menelan investasi sampai belasan triliun rupiah lebih itu ditarget rampung pada 2024.

Pemerintah Kabupaten Demak juga melakukan upaya mengurangi dampak abrasi melalui pembangunan tanggul dengan model Site Pile, pembangunan infrastruktur untuk mendukung destinasi wisata alam mangrove, pembangunan perumahan model rumah panggung dan normalisasi infrastruktur jalan kabupaten, jalan antardesa dan jalan desa. Upaya lain yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Demak adalah mengajak masyarakat peduli terhadap lingkungan, pemahaman dampak perubahan iklim, mengadakan pelatihan usaha, jasa dan pariwisata mangrove. Untuk menjaga kelestarian mangrove juga dibuat peraturan desa (Perdes) yang melarang orang melakukan perusakan ekosistem mangrove.

d. Pasar Karang Ayu, Kota Semarang

11 Komoditas Strategis yang menjadi fokus dari Badan Pangan Nasional yaitu beras, jagung, kedelai, bawang, cabai, daging ruminansia, daging ayam, telur ayam, gula pasir, minyak goreng, dan ikan. Fluktuasi harga pangan sering terjadi dalam 1 tahun belakangan ini. Permasalahan tersebut menyebabkan Pemerintah terpaksa melakukan impor komoditas pangan seperti beras, bawang putih, gula pasir, serta daging sapi dan kerbau. Terdapat berbagai permasalahan yang menyebabkan harga pangan mengalami peningkatan diantaranya keterbatasan pasokan, kenaikan biaya distribusi, Hari Raya Besar Keagamaan, dan lainnya.



Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pangan Nasional, bulan Juli terdapat peningkatan harga di beberapa komoditas, diantaranya beras premium, beras medium, bawang putih bonggol, cabai merah keriting, tepung terigu, ikan tongkol, kedelai, cabai rawit merah, gula konsumsi, jagung tingkat peternak, garam halus, dan minyak goreng kemasan.

Semarang merupakan salah satu wilayah yang terjadi fluktuasi harga di beberapa komoditas pangan. Pemerintah Daerah telah menggelar operasi pasar guna menekan harga komoditas seperti cabai, bawang merah, wortel dan tomat. Bawang Putih juga sempat dikeluhkan oleh masyarakat dikarenakan stok menipis sehingga harga mengalami kenaikan. Terdapat beberapa pedagang yang menjual bawang putih hingga Rp50.000,00 per kg.

II. HASIL KUNJUNGAN KERJA

1. Lahan Kedelai Desa Banjarsari Kec. Gajah Kab. Demak

Kabupaten Demak merupakan salah satu lumbung pangan di Jawa Tengah dengan komoditas unggulan kedelai, tetapi dalam lima tahun terakhir mengalami penurunan dan beralih tanam ke komoditas kacang hijau karena dinilai lebih menguntungkan. Perkembangan komoditas kacang hijau di Kabupaten Demak mampu mencapai Negara China, Taiwan, Philipina, Kamboja, dan Vietnam. Namun, Tahun 2023 Kabupaten Demak mencoba mengembangkan kembali komoditas kedelai di Kecamatan Gajah dengan luas 199 ha.

Komisi IV DPR RI pertama kali melakukan kunjungan ke lahan kedelai yang berada di Kecamatan Gajah tersebut. Adapun beberapa informasi yang diperoleh antara lain:

- a. Lokasi lahan kedelai yang dikunjungi memiliki hamparan seluas 300 ha dan khusus ditanami kedelai hanya 10 ha;
- b. Dinas Pertanian Kabupaten Demak telah melakukan sosialisasi pemanfaatan Biosaka di seluruh Kabupaten Demak. Khusus untuk Kecamatan Gajah yang lahannya baru ditanami kedelai, petani baru belajar membuat dan menggunakan Biosaka. Bahan baku pembuatan Biosaka berasal dari daun empon-empon yang berfungsi untuk mengatasi hama dan penyakit tanaman serta berasal dari rerumputan yang digunakan sebagai elisitor;

- c. Kabupaten Demak terjadi peningkatan produksi padi pada MT2, dalam 1 ha dapat menghasilkan lebih dari 10 ton GKP (menggunakan pupuk organik dan Biosaka, pupuk organik digunakan pertama kali penanaman sedangkan Biosaka digunakan dengan menggunakan jadwal kalender);
- d. Kabupaten Demak khusus lahan kedelai baru dianggarkan untuk 199 ha di 4 kecamatan dan 27 desa. Di Desa Banjarsari terdapat lahan kedelai seluas 10 ha.
- e. Biosaka menjadi salah satu solusi bagi petani untuk mengatasi tingginya biaya produksi akibat langka dan mahalnya harga pupuk. Biosaka dapat mengurangi penggunaan pupuk kimia dan pestisida hingga 50-90%;
- f. Biosaka digunakan di lahan kacang hijau menghasilkan produk yang sangat bagus. Biosaka menjadi tren kalangan petani yang dapat meningkatkan kesuburan lahan, tanaman yang dihasilkan memiliki massa yang lebih besar dan tahan terhadap serangan hama dan penyakit, penyakit busur pucuk (di komoditas bawang merah) jumlahnya akan lebih berkurang dibandingkan dengan yang tidak menggunakan Biosaka;
- g. Pemanfaatan Biosaka di lahan kedelai menghasilkan tanaman yang lebih tinggi dan lebih subur. Kemudian menghasilkan polong yang banyak dan besar. Bintil akar lebih banyak yang berguna untuk menghisap nutrisi yang ada di tanah untuk pertumbuhan. Biosaka juga membantu memperbaiki sifat fisik tanah;
- h. Pengaplikasian Biosaka menggunakan jadwal kalender. Sebelum terjadi serangan sudah diaplikasikan Biosaka agar tanaman lebih tahan dan kuat sehingga hama dan penyakit akan hilang karena kandungan N yang tinggi;
- i. Lahan di Kecamatan Gajah untuk MT1 dan MT2 digunakan untuk menanam padi, sedangkan MT3 digunakan untuk menanam kedelai/kacang hijau;
- j. Berdasarkan pengamatan dan informasi, Dinas Pertanian memprediksi produksi kedelai dalam 1 ha mencapai 1,9 ton (melebihi angka rata-rata yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian);
- k. Peningkatan harga kedelai impor berdampak terhadap harga kedelai lokal pada saat ini menjadi sekitar Rp9.000,00 sampai Rp11.000,00/kg sehingga minat petani untuk menanam kedelai kembali naik. Harga kedelai lokal saat ini mencapai Rp11.000,00-Rp12.000,00/kg dan dengan harga tersebut, petani tertarik untuk menanam kedelai lokal. Harga kedelai lokal di tingkat

produsen untuk wilayah Demak, Blora, Semarang, dan Grobogan berkisar antara Rp9.000,00 sampai Rp10.500,00/kg;

- l. Meminta dukungan alsintan penyiangan dan dapat membenamkan rumput di sawah. Penggunaan Herbisida menyebabkan tanah menjadi tidak subur dan berpengaruh kepada jumlah anakan yang berproduksi; serta
- m. Perlu dilakukan identifikasi kembali potensi lahan untuk pengembangan kedelai secara luas di Demak melalui cara tumpangsisip atau *methug*. Disamping itu juga, memperluas kerja sama pembelian hasil panen kedelai petani untuk memberikan jaminan pasar dan harga jual, serta mempersiapkan penangkaran benih kedelai insitu.

Paparan PT Pupuk Indonesia

Berdasarkan Permentan Nomor 10 Tahun 2022 yang menyatakan bahwa pupuk bersubsidi ditujukan hanya untuk petani yang akan menanam 9 komoditas, diantaranya padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, kopi, kakao, dan tebu rakyat. Terkait dengan hal tersebut, Pupuk Indonesia telah menyalurkan pupuk bersubsidi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun rincian realisasi penyaluran pupuk bersubsidi, diantaranya:

- a. Realisasi penyaluran pupuk NPK Bersubsidi di Kabupaten Demak, semakin lama mengalami penyusutan. Untuk Tahun 2022, realisasi hanya 18.265 ton atau 97% sedangkan untuk Tahun 2023 per Juni 2023 baru mencapai 39% atau sekitar 7.092 ton dari 18.200 ton; serta
- b. Realisasi penyaluran pupuk Urea Bersubsidi di Kabupaten Demak, juga mengalami penurunan. Tahun 2020 sekitar 99% dari 35.000 ton, Tahun 2021 sekitar 82% dari 30.584 ton, Tahun 2022 sekitar 95% dari 28.147 ton, dan Tahun 2023, per Juni 2023 hanya mencapai 39% dari 33.000 ton.

PENYALURAN PUPUK NPK BERSUBSIDI KABUPATEN DEMAK 2019 - 2023

Satuan : Ton

TAHUN	ALOKASI	REALISASI	%
2019	16.160	16.075	99%
2020	19.890	19.879	100%
2021	18.175	18.159	100%
2022	18.737	18.265	97%
2023 (s/d Juni)	18.200	7.092	39%

Catatan : Penyaluran Kios kepada Petani (F6)

PENYALURAN PUPUK UREA BERSUBSIDI KABUPATEN DEMAK 2019 - 2023

Satuan : Ton

TAHUN	ALOKASI	REALISASI	%
2019	32.700	32.571	100%
2020	35.000	34.726	99%
2021	30.584	25.145	82%
2022	28.147	26.765	95%
2023 (s/d Juni)	33.000	13.014	39%

Catatan : Penyaluran Kios kepada Petani (F6)

Tanggapan Kementerian Pertanian:

- Tahun 2023, Kementerian Pertanian melakukan kegiatan penanaman kedelai seluas 250 ribu ha (lebih tinggi dibandingkan dengan tahun lalu yaitu sekitar 150 ribu ha);
- Benih kedelai yang ditanam di Kabupaten Demak berasal dari Grobogan;
- Kementerian Pertanian meminta agar petani dapat beralih menggunakan pupuk organik, pestisida, biosaka nabati guna menekan harga produksi serta dapat memanfaatkan inovasi biosaka; Petani juga dapat menggunakan beragam bantuan seperti program KUR, bantuan tanpa agunan lainnya, serta Asuransi pertanian;
- Kementerian Pertanian selama ini telah melakukan berbagai strategi untuk meningkatkan motivasi petani dalam menanam kedelai, seperti rasionalisasi harga benih kedelai bantuan pemerintah, dan menjembatani petani dengan offtaker agar hasil panen segera ditampung; serta
- NTP Pangan di atas 100.

Tanggapan Pemerintah Daerah:

- a. Sektor pertanian merupakan salah satu lapangan usaha terbesar yang menyokong perekonomian Kabupaten Demak. Terdapat 56,74% dari 89.743 ha luas wilayah Kabupaten Demak merupakan persawahan dan menjadi lumbung padi di Provinsi Jawa Tengah;
- b. Selain komoditas padi, Kabupaten Demak juga memiliki komoditas unggulan lainnya yaitu kacang hijau, bawang merah, cabai, dan kedelai. Pada tiga tahun terakhir ini, petani di wilayah Kabupaten Demak melakukan penanaman kacang hijau seluas kurang lebih 21.825 hektar;
- c. Pada Tahun 2023, petani Kabupaten Demak baru menanam kedelai setelah vakum sejak Tahun 2018. Pemerintah juga memberikan dukungan berupa bantuan benih kedelai untuk 199 ha yang digunakan untuk 4 Kecamatan yaitu Gajah, Sayung, Kebonagung, dan Karangtengah yang tersebar di 27 Desa. Selain bantuan bibit, juga terdapat bantuan pestisida sebanyak 398 liter, pupuk hayati 597 liter dan NPK sebanyak 9.950 kilogram;
- d. Pemerintah Daerah meminta dukungan kepada Komisi IV DPR RI terkait dengan permasalahan pupuk dalam rangka membantu produktivitas berbagai komoditas pertanian di Kabupaten Demak dapat terus meningkat; serta
- e. Pemerintah Daerah mengapresiasi dukungan Pemerintah Pusat yang dapat memberikan kepastian penjualan kedelai agar dapat berjalan dengan optimal. Contohnya, CV Sujinah Grobogan yang dapat membeli kedelai hasil penanaman petani Kabupaten Demak, baik yang akan dijadikan benih maupun konsumsi dengan harga 5% di atas harga kedelai impor.

Tanggapan dan Aspirasi Petani, Penyuluh, dan Lainnya

- a. Dalam rangka menanam komoditas kedelai, petani masih terkendala oleh cuaca. Petani membutuhkan dukungan pompa air dan irigasi;
- b. Kedelai sudah mencapai harga Rp11.000,00/kg dan petani siap mendukung program pemerintah untuk mengurangi impor kedelai;
- c. Petani/Kepala Desa Karangharjo Grobogan mengusulkan untuk Bendungan Dumpil yang ada di Kabupaten Grobogan dapat digunakan tetapi airnya tidak dapat maksimal digunakan. Oleh karena itu, meminta

- dukungan irigasi saluran primer agar dapat mengairi Desa Karangharjo Grobogan;
- d. Meminta dukungan program untuk petani milenial dan akan mengawal kegiatan hingga sampai panen; serta
 - e. Harga gabah meminta ditingkatkan agar menarik minat petani untuk menanam, pupuk diharapkan penyalurannya diperbaiki/dilancarkan dan diharapkan petani disubsidi serta diberikan bantuan kepada petani.

Tanggapan Badan Pangan Nasional

- a. Terkait dengan harga pangan, Bapanas sudah memperhatikan harga beras dan gabah. Bapanas telah mempertimbangkan sesuai dengan saran dari *stakeholder*. Bapanas juga telah menaikkan Harga Acuan Pembelian Pemerintah dan setiap tahun akan selalu terkoreksi.

Tanggapan Komisi IV DPR RI

- a. Komisi IV DPR RI mendorong sektor pertanian untuk terus menghadirkan inovasi dalam meningkatkan produktivitas pertanian;
- b. Komisi IV DPR RI juga meminta Kementerian Pertanian untuk tetap membuka ruang bagi petani dan penyuluh dalam berinovasi contohnya dalam menggunakan biosaka dalam rangka peningkatan kesuburan tanaman;
- c. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah untuk lebih memperhatikan petani disebabkan masih terdapat beberapa keluhan dari petani terkait dengan impor bahan pangan, harga pupuk, serta harga komoditas pertanian yang rendah;
- d. Komisi IV DPR RI mengapresiasi program penanaman kedelai yang dilakukan Pemerintah di Kabupaten Demak;
- e. Komisi IV DPR RI menyarankan kepada Dinas Pertanian Kabupaten Demak untuk membuat galengan/pematang sawah di lahan kedelai agar lebih produktif. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk mendukung pembuatan galengan/pematang sawah di lahan kedelai Kecamatan Gajah Kabupaten Demak;
- f. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah untuk mendukung pengembangan lahan kedelai dengan memberikan bantuan alsintan berupa pompa air dan irigasi;

- g. Komisi IV DPR RI akan menyampaikan kepada Komisi V untuk mendukung irigasi primer di Bendungan Dumpil yang ada di Kabupaten Grobogan;
- h. Komisi IV DPR RI meminta Bapanas membuat kebijakan yang melindungi petani terkait dengan harga komoditas (harga yang ramah dan diinginkan baik di tingkat petani dan konsumen);
- i. Komisi IV DPR RI meminta Bapanas untuk menjaga kesejahteraan petani karena kegiatan impor beras yang saat ini dilakukan oleh Pemerintah, mempengaruhi semangat petani dalam menanam padi;
- j. Komisi IV DPR RI meminta Bapanas untuk mempertimbangkan HPP beras yang ditetapkan. Bapanas sebaiknya berkonsultasi terlebih dahulu dengan kepala daerah dan petani/keompok tani/dinas pertanian terkait dengan HPP Beras tersebut;
- k. Komisi IV DPR RI meminta agar dilibatkan dalam menetapkan kebijakan yang dikeluarkan oleh Bapanas; serta
- l. Komisi IV DPR RI meminta Bapanas agar tidak hanya berdiskusi dengan penggilingan beras tetapi juga perlu berdiskusi dan melibatkan penggilingan kecil terkait dengan penetapan HPP Beras.

2. Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak, Desa Purworejo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak

Profil Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak

Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Morodemak dengan sarana dan prasarana yang tersedia guna melayani dan memberikan fasilitasi usaha bidang kelautan dan perikanan dibentuk melalui Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2008, sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah. Kawasan PPP Morodemak terletak pada 110° 32' 40" BT dan 6° 49' 30" LS, di Dukuh Kongsu Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak dengan luas 3,9 ha dengan panjang pantai 34,1 km. Perairan Morodemak merupakan laut tempat muara dari Sungai Tuntang Lama. Aktivitas perikanan tangkap di PPP Morodemak cukup berkembang meski armadanya masuk ke dalam golongan nelayan skala kecil atau armada semut yang ditandai dengan ukuran kapal kurang dari 30 GT serta beroperasi dalam satu hari menangkap (*one day fishing*) oleh karena itu Kabupaten Demak

masuk ke dalam Program Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu SEKAYA MARITIM (Seribu Kampung Nelayan Mandiri, Tangguh, Indah, dan Maju).

Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, dibentuk melalui Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2008 dan Perjanjian kerja sama antara Gubernur Jawa Tengah dan Bupati Demak Nomor 36 Tahun 2010 dan Nomor 523/045 tanggal 25 Februari 2010 tentang Pengolahan dan Pengembangan PPP Morodemak. Perjanjian kerja sama antara DKP Provinsi Jawa Tengah dan DKP Kabupaten Demak Nomor 523/1956/2010 dan Nomor 523/882 tanggal 15 Desember 2010 tentang Pengolahan dan Pengembangan PPP Morodemak.

Paparan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan

Indonesia merupakan pasar yang potensial dengan jumlah penduduk lebih dari 270 juta jiwa didukung sumber daya perikanan tangkap dan perikanan budi daya yang besar. Potensi perikanan tangkap Indonesia diperkirakan 12,01 juta ton per tahun yang tersebar di seluruh perairan Indonesia. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menerapkan kebijakan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan berbasis ekonomi biru. Kebijakan ini menggabungkan aspek biologi, ekologi, sosial, dan ekonomi yang seimbang dalam tata kelola kelautan dan perikanan nasional yang selanjutnya dijabarkan ke dalam 5 program utama, yaitu:

- a. Memperluas kawasan konservasi laut;
- b. Penangkapan ikan terukur berbasis kuota;
- c. Pengembangan budi daya ikan di kawasan laut, pesisir, dan darat secara berkelanjutan;
- d. Pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
- e. Pembersihan sampah laut melalui partisipasi nelayan.

Pada tanggal 15 Mei 2023, telah diundangkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. PP ini memiliki nilai strategis untuk menjaga kesehatan laut. Secara alami hasil sedimentasi di laut terbentuk melalui proses pelapukan dan erosi, yang terdistribusi oleh dinamika oseanografi dan terendapkan. Apabila proses tersebut terjadi pada lokasi yang telah dimanfaatkan untuk aktivitas tertentu

atau berada pada lokasi yang memiliki ekosistem laut sensitif maka akan berpotensi mengganggu daya dukung ekosistem pesisir dan laut dan kegiatan sekitarnya.

PP Nomor 26 Tahun 2023 ditetapkan sebagai payung hukum untuk melaksanakan tugas Pemerintah dalam melindungi dan melestarikan ekosistem laut melalui peningkatan daya dukung ekosistem dan kesehatan laut sebagaimana amanat pasal 56 Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. PP ini hadir sebagai *rule based* untuk mengelola hasil sedimentasi di laut agar tidak menurunkan daya dukung ekosistem pesisir dan laut, memberi dampak positif dari aspek ekologi, dan memberikan manfaat dari aspek ekonomi.

Pengaturan tentang pengelolaan sedimentasi di laut dilakukan agar kesehatan laut terjaga dengan cara membersihkan sedimen pada lokasi-lokasi yang secara akademis merupakan lokasi yang dianggap mengganggu daya dukung. Misalnya mengganggu akses nelayan atau menutupi ekosistem terumbu karang dan lamun. Pengelolaan hasil sedimentasi di laut didasarkan pada perencanaan yang termuat dalam dokumen perencanaan. Dokumen perencanaan dimaksud dihasilkan oleh KKP bersama kementerian/lembaga terkait diantaranya KLHK, KESDM, Kemenhub, Pusidros, Pemerintah Daerah dan lembaga lainnya yang tergabung dalam Tim Kajian. Tim kajian akan menentukan lokasi, volume pembersihan dan pemanfaatan sedimen, jenis mineral, dampak sedimentasi, upaya pengendalian dan upaya rehabilitasi.

Wilayah perairan yang diatur dalam pengelolaan hasil sedimentasi sebagaimana dengan PP Nomor 26 Tahun 2023 ini adalah seluruh perairan laut yang secara akademis merupakan wilayah yang mengalami penurunan lingkungan, kecuali wilayah-wilayah yang di dalam rencana tata ruang dan rencana zonasi nya merupakan wilayah izin usaha pertambangan, wilayah Pelabuhan, dan zona inti konservasi. Material sedimen yang dibersihkan tidak dapat dilakukan *dumping* (pembuangan) sembarangan, sehingga material tersebut dapat dimanfaatkan pada lokasi yang ditentukan, terutama untuk material reklamasi, infrastruktur Proyek Strategis Nasional (PSN).

Apabila terdapat kelebihan material sedimentasi untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri, baru dapat diekspor. Selain dapat dimanfaatkan untuk material pembangunan, sedimentasi dapat pula digunakan untuk rehabilitasi ekosistem

pesisir dan laut. Pembersihan sedimen merupakan kegiatan berbeda dengan pertambangan dan pengerukan alur. Pembersihan sedimen fokus untuk kesehatan laut. Keuntungan ekonomi dari pembersihan sedimen berupa pasir adalah faktor tambahan. Untuk pertambangan dan pengerukan alur dilakukan untuk tujuan yang berbeda. Pembersihan dilakukan terhadap:

- a. Sedimen yang menyebabkan penurunan kualitas air laut.
- b. Sedimen yang menurunkan kualitas fisik pesisir.
- c. Sedimen yang menyebabkan pencemaran pantai.
- d. Sedimen yang merusak wilayah pemijahan ikan dan daerah asuhan.
- e. Sedimen yang meningkatkan kadar padatan tersuspensi di dasar perairan laut.
- f. Sedimen yang menyebabkan banjir air rob.
- g. Sedimen yang merusak ekosistem terumbu karang dan fauna yang mendiami ekosistem tersebut.

Pengelolaan sedimen ini sesuai dengan strategi *Blue Economy* untuk memulihkan kesehatan laut dan mempercepat ekonomi laut yang berkelanjutan, memberikan dasar yang sesuai untuk menjaga kesehatan dan ketahanan laut dalam jangka panjang, menciptakan lapangan kerja dan menarik investasi bisnis yang ramah lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir serta memperkuat ekonomi dan kedaulatan nasional. Saat ini KKP telah melaksanakan sosialisasi dan konsultasi Publik di beberapa daerah seperti Jakarta, Lampung dan Jawa Tengah. Selanjutnya akan dilaksanakan sosialisasi dan konsultasi publik beberapa lain di Indonesia seperti di Kalimantan dan Sulawesi. Saat ini juga sedang dilakukan penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang aturan pelaksanaan PP Nomor 26 Tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut dengan melibatkan pakar dan akademisi dari berbagai perguruan tinggi seperti IPB, ITB, UNDIP, UGM, UNRAM, dan universitas lainnya.

Kementerian Perikanan dan Kelautan mengharapkan para akademisi dapat mendukung dan memperkaya substansi Rancangan Permen khususnya dalam aspek operasionalisasi, teknik, dan rekayasa pantai dari kegiatan pembersihan dan pemanfaatan hasil sedimentasi di laut. Hal tersebut sangat diperlukan sehingga dapat dipastikan pelaksanaan pembersihan dan pemanfaatan

menggunakan peralatan dan metode yang ramah lingkungan serta meminimalkan penurunan daya dukung ekosistem pesisir dan laut.

Tanggapan Komisi IV DPR RI:

- a. Komisi IV DPR RI mendapatkan masukan dari warga terkait pembangunan tambang pasir laut. Disamping itu, Komisi IV DPR RI juga melihat secara langsung kondisi sedimentasi dan pasang air laut yang menyebabkan nelayan harus berbelok alur; serta
- b. Komisi IV DPR RI mendapatkan masukan dari masyarakat pesisir dari tiga desa (Morodemak, Margolindo, dan Purworejo) yang melakukan aksi diam dan membentangkan spanduk penolakan terhadap rencana penambangan sedimentasi pasir laut di Muara Demak.

3. Desa Bedono, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak

Profil Kabupaten Demak

a. Kondisi Biofisik

Kabupaten Demak merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Tengah yang keberadaannya terletak di wilayah pesisir Pantai Utara Jawa dan berhubungan dengan Laut Jawa. Luas wilayah Kabupaten Demak 897,43 km² dengan jumlah penduduk 1.169.409 jiwa (Mei 2023). Kabupaten Demak terbagi dalam 14 kecamatan, 243 desa dan 6 kelurahan. Secara hidrologis Kabupaten Demak terbagi dalam 6 DAS yang hulunya di luar kabupaten Demak ke-6 DAS tersebut yaitu:

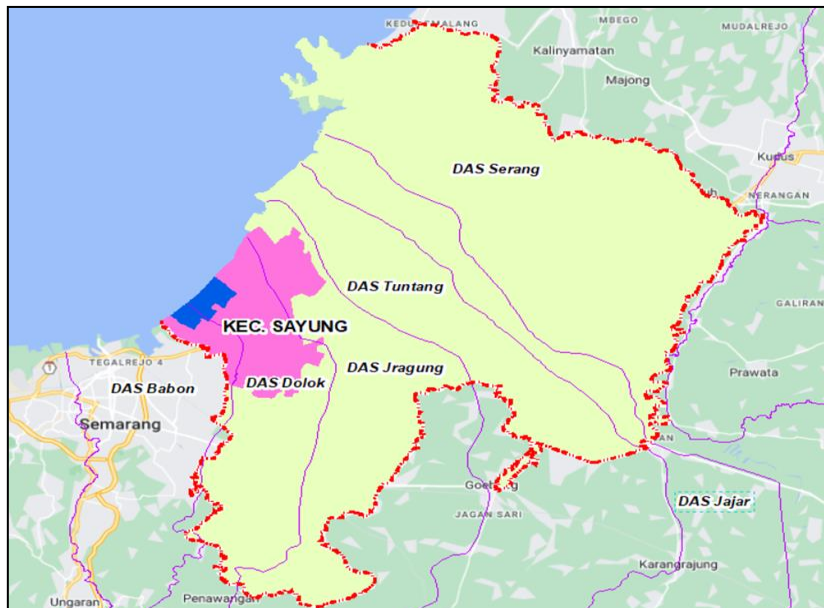
- 1) DAS Serang: 392,267 ha bermuara di wilayah Kec. Wedung;
- 2) DAS Tuntang: 108,973 ha bermuara di wilayah Kec. Bonang;
- 3) DAS Jajar: 21.160 ha bermuara di wilayah Kec. Karangtengah;
- 4) DAS Jragung: 40.111 ha bermuara di wilayah Kec. Karangtengah;
- 5) DAS Babon: 19.752,11 ha bermuara di wilayah Kec. Sayung; dan
- 6) DAS Dolog: 18.640 ha bermuara di wilayah Kec. Sayung.

Ditinjau dari bentang alamnya Kabupaten Demak, bervariasi dari bergelombang hingga dataran rendah/landai hampir 75% wilayah adalah dataran rendah. Data lereng untuk masing masing DAS di Kabupaten Demak yaitu:

- 1) DAS Serang menunjukkan bahwa $\pm 18,96\%$ berlereng curam;

- 2) DAS Tuntang $\pm 9,15\%$ berlereng curam;
- 3) DAS Babon $\pm 7,85\%$ berlereng curam;
- 4) DAS Dolok $\pm 5,05\%$ berlereng curam;
- 5) DAS Jragung $\pm 7,69\%$ berlereng curam.

Tipe kelerengan DAS bervariasi tetapi di beberapa lokasi di hulu DAS rata-rata memiliki sifat air larian/*run off* berjalan cepat, kondisi ini disebabkan oleh penutupan vegetasi dan perlakuan konservasi tanah tidak baik.



Gbr. Peta DAS di Kabupaten Demak

b. Banjir Rob Demak

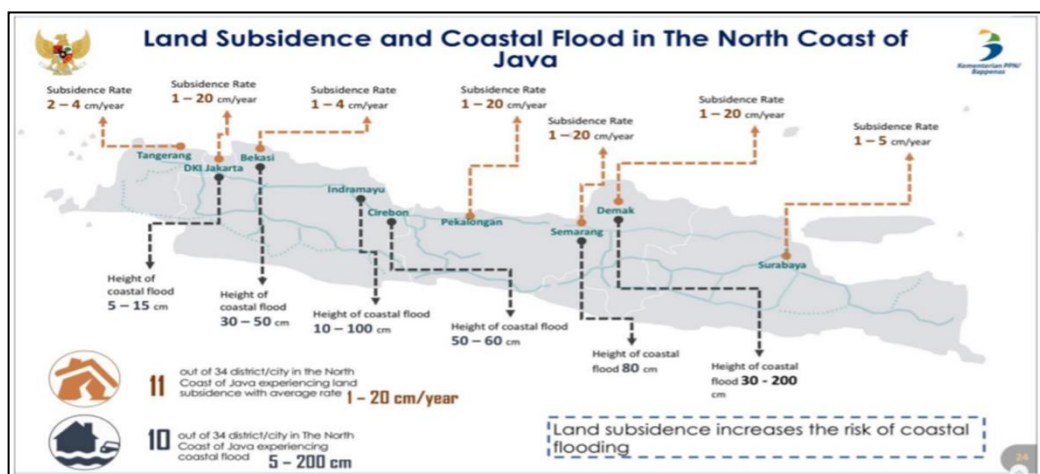
- 1) Banjir ROB atau lebih dikenal dengan banjir laut pasang adalah jenis banjir yang disebabkan oleh naiknya atau pasangannya air laut sehingga menuju ke daratan sekitarnya.
- 2) Sering terjadi antara pertengahan Desember s.d. pertengahan Januari seiring datangnya bulan Purnama.
- 3) Berdampak pada aktivitas warga dan melumpuhkan perekonomian masyarakat.
- 4) Dilaporkan dampak rob terdapat 23 desa, 157 fasilitas umum, 6.088 ha sawah lahan pertanian dan 44.884 jiwa. Bahkan banjir ROB datangnya bisa tiap hari dan tak tentu waktunya, bisa pagi, siang atau malam. Daerah seperti Sriwulan, Bedono, Timbulsloko merupakan daerah langganan banjir ROB.



Gbr. Banjir Rob di Desa Bedono, Kecamatan Sayung, Demak

c. Penyebab Banjir Rob

- 1) Permukaan air tanah yang lebih rendah dari pada muka pasang air laut;
- 2) Bertambah tingginya pasang air laut akibat dari efek pemanasan global dan cuaca ekstrim;
- 3) Adanya penurunan permukaan tanah (*land subsidence*). *Land subsidence* sendiri disebabkan oleh konsolidasi tanah yang belum mantap, pengambilan air tanah yang berlebihan dan kurangnya resapan air. Sedimentasi dari daerah atas (burit) di muara sungai, maupun sedimentasi air laut khususnya oleh pasang surut (rob);
- 4) Adanya pengaruh gelombang dan arus sejajar pantai, sehingga terjadi pendangkalan muara yang berakibat mengurangi kapasitas penyaluran dan akibat selanjutnya memperparah banjir di sekitarnya;
- 5) Ekosistem mangrove mengalami degradasi dan fragmentasi yang diakibatkan oleh abrasi sehingga air laut mudah masuk kedaratan dan perubahan garis pantai.



Gbr. Peta Sebaran Penurunan Permukaan Tanah di Pulau Jawa



Gbr. Foto Udara Perubahan Garis Pantai Akibat Abrasi di Desa Bedono

d. Penanggulangan Banjir Rob

- 1) Penanggulangan Banjir ROB harus melibatkan para pihak dan terintegrasi antara hulu dan hilir DAS;



Gbr. Pelibatan Parapihak dan Terintegrasi Antara Hulu dan Hilir DAS

2) Pada Hulu Daerah Aliran Sungai (DAS);

- a) Pembangunan Bendung Jragung yang sedang berlangsung, di Kab. Semarang akan mampu mereduksi air banjir 45%, pengendalian banjir inflow Q 100 th: 378,00 m³/dt menjadi Outflow Q 100 th: 170,00 m³/dt. Pemenuhan irigasi: 4.528 ha. Air baku Semarang, Demak, Grobogan 1 m³/dt. Mendorong percepatan pembangunan bendung Dolog.
- b) Melakukan upaya rehabilitasi hutan dan lahan dengan pola vegetatif dan sipil teknis di kawasan hutan negara atau tanah milik rakyat.

- c) Penetapan Pola Ruang yang sesuai untuk pengembangan kawasan terbangun dengan memperhatikan pelestarian lingkungan hidup di hulu DAS.
 - d) Penerapan Imbal Jasa Lingkungan yang tegas bagi Industri di wilayah Demak, untuk bersumbangsih terkait permasalahan banjir rob baik di lokasi terdampak banjir maupun di daerah pasokan banjir hulu DAS.
- 3) Pada Hilir Daerah Aliran Sungai (DAS);
- a) Rehabilitasi Mangrove;
 - b) Penghijauan pantai, dengan tanaman cemara udang, cemara laut, glodogan, pandan, gayam, pada lokasi yang kosong tanah desa atau bibir pantai yang tidak bersentuhan langsung dengan air laut;
 - c) Perlu penetapan zona konservasi/mengembalikan ekosistem pesisir;
 - d) Pengembangan sistem polder;
 - e) Kolam retensi;
 - f) Normalisasi sungai;
 - g) Pembuatan tanggul laut.

Aspirasi Masyarakat Desa Bedono, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak

- a. Kondisi geomorfologi dan ekosistem Desa Bedono, Kecamatan Sayung dalam beberapa tahun terakhir berubah secara drastis, dimana beberapa tahun sebelumnya di sekitar desa terdapat banyak sawah dan lahan pertanian serta tambak, namun saat ini tidak ditemukan, karena abrasi dan terendam oleh rob;
- b. Beberapa kampung di Desa Bedono terendam karena abrasi dan banjir rob, sehingga harus direlokasi;
- c. Terputusnya sarana prasarana jalan desa, kecamatan dan kabupaten, sehingga untuk ke balai desa jaraknya menjadi sangat jauh, menempuh jarak hingga mencapai 24 km;
- d. Pembangunan jalan tol Demak meningkatkan abrasi dan banjir rob di Desa Bedono; serta
- e. Terbangunnya kesadaran kolektif masyarakat Desa Bedono untuk melestarikan hutan mangrove, melalui penanaman dan menjaga serta

melindungi dengan peraturan desa (Perdes), dengan harapan mengurangi abrasi dan banjir rob serta membangun ekosistem perikanan dan pertanian.

4. Pasar Karang Ayu, Kelurahan Karangayu, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang

Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan ke Pasar Karang Ayu untuk mengetahui ketersediaan dan harga pangan komoditas strategis. Berikut ini perkembangan harga di tingkat ecer:

Komoditas	Harga
Beras Premium	Rp12.000,00-13.000,00/kg
Beras Bulog/SPHP (Medium)	Rp9.450,00/kg
Beras Medium (Stroberi)	Rp11.000,00/kg
Gula pasir	Rp14.000,00/kg
Minyak	Rp14.000,00/kg
Telur	Rp30.000,00-Rp31.000,00/kg
Cabe Merah Keriting	Rp30.000,00-Rp40.000,00/kg
Cabe Merah Besar	Rp25.000,00/kg
Cabe Rawit	Rp35.000,00/kg
Bawang Merah	Rp25.000,00-Rp28.000,00/kg
Bawang Putih	Rp40.000,00-Rp45.000,00/kg
Daging Sapi	Rp130.000,00/kg
Daging Ayam	Rp40.000,00/kg
Ikan	Rp30.000,00-40.000,00/kg

Terkait dengan kunjungan tersebut, Komisi IV DPR RI mendapatkan gambaran bahwa:

- a. Pedagang eceran membutuhkan beras Bulog dibandingkan dengan beras lainnya karena harganya lebih rendah dan kualitas tidak jauh dengan beras premium. Dikarenakan tingginya permintaan, Perum Bulog harus menggunakan sistem kuota pengiriman beras medium ke pasar;
- b. Masyarakat lebih memilih Minyak Kita dan minyak curah karena harga lebih rendah dibandingkan dengan lainnya;
- c. Pasokan beras, minyak, dan gula lancar;
- d. Harga telur tidak mengalami penurunan;

- e. Trend kenaikan harga daging sapi terjadi ketika menjelang Hari Raya Idul Adha dan kembali normal setelah Hari Raya Idul Adha. Trend permintaan daging sapi setelah Hari Raya Idul Adha mengalami penurunan dibandingkan sebelum Hari Raya Idul Adha;
- f. Trend penurunan permintaan komoditas pangan terjadi ketika setelah Hari Raya Idul Adha;
- g. Terjadi peningkatan harga ayam hingga sayur mayur. Sebelum Hari Raya Idul Adha harga ayam sekitar Rp32.000,00-Rp33.000,00/kg dan setelah Hari Raya, harga mencapai Rp40.000,00/kg. Kenaikan harga ayam terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Pasokan daging ayam masih stabil;
- h. Harga komoditas pangan secara keseluruhan mengalami kenaikan; serta
- i. Terdapat berbagai faktor yang menyebabkan penurunan konsumen di pasar. Contohnya dikarenakan masyarakat masih memiliki stok persediaan setelah Hari Raya Idul Adha dan rata-rata masyarakat memiliki perilaku membeli secara online.

Paparan Perum Bulog

- a. Beras impor masuk ke Semarang per 20 Juli 2023 yaitu sekitar 9.521,66 ton;
- b. Daging kerbau impor masuk ke Semarang per 20 Juli 2023 sekitar 18 ribu ton;
- c. Penyaluran beras ke pasar telah direalisasikan oleh Perum Bulog per 20 Juli 2023 sekitar 14.565,49 ton;
- d. Perum Bulog telah melakukan penyerapan beras/gabah petani sekitar 27.857,18 ton per 20 Juli 2023; serta
- e. Harga beras premium di pasar selama 1 bulan (per 20 Juni 2023-20 Juli 2023) sekitar Rp12.000/kg.

Tanggapan Komisi IV DPR RI

- a. Komisi IV DPR RI akan berdiskusi dengan Pemerintah terkait permasalahan kenaikan harga telur dan ayam. Komisi IV DPR RI akan meminta Pemerintah untuk mencari jalan tengah agar harga di pasar tidak terlalu tinggi, namun tetap menguntungkan petani dan peternak;

III. KESIMPULAN

1. Komisi IV DPR RI mendorong sektor pertanian untuk terus menghadirkan inovasi dalam meningkatkan produktivitas pertanian;
2. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah untuk lebih memperhatikan petani disebabkan masih terdapat beberapa keluhan dari petani terkait dengan impor bahan pangan, harga pupuk, serta harga komoditas pertanian yang rendah;
3. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah untuk mendukung pengembangan lahan kedelai dengan memberikan bantuan alsintan berupa pompa air dan irigasi;
4. Komisi IV DPR RI meminta Bapanas membuat kebijakan yang melindungi petani terkait dengan harga komoditas (harga yang ramah dan diinginkan baik di tingkat petani dan konsumen);
5. Komisi IV DPR RI meminta agar dilibatkan dalam menetapkan kebijakan yang dikeluarkan oleh Bapanas;
6. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan c.q. Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut untuk membantu nelayan di sekitar Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Morodemak untuk mengatasi permasalahan sedimentasi dan pendangkalan jalur pelayaran nelayan melalui normalisasi jalur pelayaran nelayan;
7. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk dapat membantu sarana prasana nelayan di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Morodemak berupa perpanjangan breakwater, peninggian dermaga, pemasangan rambu suar atau sarana bantu navigasi pelayaran;
8. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk dapat mengatasi, mengendalikan serta meminimalkan abrasi dan banjir rob melalui rehabilitasi hutan dan mangrove yang komprehensif dan terintegrasi dari hulu hingga ke hilir; serta
9. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk membantu masyarakat melalui program-program pemberdayaan masyarakat kaitannya dengan rehabilitasi hutan dan mangrove untuk mengatasi, mengendalikan serta meminimalkan abrasi abrasi dan banjir rob;
10. Komisi IV DPR RI akan berdiskusi dengan Pemerintah terkait dengan permasalahan kenaikan harga telur dan ayam. Komisi IV DPR RI akan

meminta Pemerintah untuk mencari jalan tengah agar harga di pasar tidak terlalu tinggi, namun tetap menguntungkan petani dan peternak.

IV. PENUTUP

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI reses Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022-2023 ke Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya Komisi IV DPR RI akan menindaklanjuti seluruh aspirasi dan rekomendasi dalam Rapat Kerja maupun Rapat Dengar Pendapat dengan Mitra Kerja Komisi IV DPR RI. Semoga kunjungan kerja kali ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Jakarta, 24 Juli 2023

Ketua Tim,

Dr. Anggia Erma Rini, M.K.M.
A-294

LAMPIRAN MEDIA ELEKTRONIK

Komisi IV: Pupuk Biosaka Terbukti Menyuburkan Tanaman Kedelai

Kabupaten Demak, Jawa Tengah, kini sedang giat menanam bibit kedelai di areal persawahan pasca panen padi. Para petani setempat meramu sendiri semacam pupuk organik yang diberi nama Biosaka. Dengan Biosaka, terbukti tanaman kedelai tumbuh subur dan menghasilkan polong kedelai yang besar dan banyak.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini mengungkapkan hal ini saat memimpin delegasi Komisi IV melihat langsung tanaman kedelai yang tumbuh subur. Kebetulan, kali pertama Demak secara massal menanam varitas kedelai. "Bagi Kabupaten Demak, ini baru pertama kali menanam kedelai. Biasanya mereka menanam kacang hijau. Menurut saya bagus. Kalau dilihat dari umur yang satu setengah bulan, polongnya sudah banyak dan besar-besar. Estimasi proyeksinya bagus," ujar Anggia kepada Parlemen, Senin (17/7/2023).

Dijelaskan Anggia, Biosaka sendiri sebetulnya bukan pupuk atau pestisida, tapi elisitor yang mengurangi penggunaan pupuk kimia dan pestisida hingga 50 sampai 90 persen. Biosaka juga terbukti meminimalisir serangan hama dan menjadikan lahan lebih subur. Tanaman kedelai di Demak juga tak terpengaruh dengan iklim cuaca.

Anggia melihat, pertumbuhan akar tanaman kedelai yang menggunakan Biosaka, ternyata serabut akarnya lebih banyak daripada yang tidak mengaplikasikan Biosaka. Sehingga, serabut akar itu mengalirkan nutrisi lebih banyak ke batang tanaman "Tadi kita lihat yang menggunakan pupuk organik dan non organik. Ternyata pakai Biosaka itu bagus. Iklim cuaca tidak terlalu berefek. Ini belum saatnya panen, tapi melihat hasilnya sangat bagus," ungkap Anggota F-PKB DPR RI ini.

Biosaka, lanjut Anggia, bukan produk pabrikan yang diproduksi secara massal. Tapi, masih diproduksi secara terbatas dan mandiri oleh para petani. Biosaka kelak akan diserahkan ke kementerian terkait untuk diteliti dan ditindaklanjuti produksinya. "Jika itu nanti memberikan harapan kepada petani, kenapa tidak (diproduksi massal)," ujar legislator Jatim VI ini.

Dari keterangan literatur, Biosaka diambil dari 2 suku kata, yaitu Bio berarti hidup dan Saka singkatan dari selamatkan alam. Biosaka sekali lagi adalah elisitor, yaitu senyawa kimia yang dapat memicu respon fisiologi dan morfologi pada tanaman, sehingga menjadi lebih baik. Ia memberikan sinyal positif bagi membran sel pada akar,

sehingga lebih energik dan produktif. Bisa dikatakan, Biosaka adalah produk teknologi terbaru pada dunia pertanian organik modern. (mh/rdn)

Sumber:

<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/45574/t/Komisi%20IV:%20Pupuk%20Biosaka%20Terbukti%20Menyuburkan%20Tanaman%20Kedelai>

Sumber lainnya:

Pertanian:

1. <https://rm.id/baca-berita/parlemen/180488/lihat-pemanfaatan-biosaka-di-demak-komisi-iv-puji-inovasi-petani>
2. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/45598/t/Pupuk+Biosaka+Butuh+Dukungan+Pemerintah+>
3. <https://padangkita.com/dpr-dukung-biosaka-diteliti-untuk-diproduksi-massal-gantikan-pupuk-kimia/>
4. <https://betanews.id/2023/07/komisi-iv-dpr-ri-harapkan-demak-bisa-tekan-pengambilan-kedelai-impor.html>
5. <https://monitor.co.id/2023/07/18/komisi-iv-dpr-setuju-pengembangan-kedelai-di-seluruh-indonesia/>
6. <https://pangannews.id/berita/1689661261/harga-kedelai-naik-komisi-iv-dpr-tinjau-lahan-kedelai-di-demak>
7. <https://sippn.menpan.go.id/berita/75544/dinas-komunikasi-dan-informatika/pemerintah-pusat-siapkan-anggaran-untuk-tanam-kedelai-250-ribu-hektar>
8. <https://betanews.id/2023/07/komisi-iv-dpr-ri-harapkan-demak-bisa-tekan-pengambilan-kedelai-impor.html>
9. https://www.rri.go.id/jawa-tengah/daerah/289865/demak-tingkatkan-produksi-kedelai-lokal-tekan-kuota-impor?utm_source=news_main&utm_medium=internal_link&utm_campaign=General%20Campaign
10. <https://poskota.co.id/2023/07/18/komisi-iv-pupuk-biosaka-terbukti-menyuburkan-tanaman-kedelai>
11. <https://rm.id/baca-berita/parlemen/180488/lihat-pemanfaatan-biosaka-di-demak-komisi-iv-puji-inovasi-petani>

12. <https://badanpangan.go.id/blog/post/nfa-dukung-peningkatan-ketersediaan-kedelai-lokal-melalui-pengembangan-produktivitas-berbasis-benih-unggul>

Kelautan dan Perikanan:

1. <https://yogyakarta.kompas.com/read/2023/07/18/074902978/kala-kapal-rombongan-komisi-iv-dpr-terjebak-di-perairan-demak>
2. <https://jateng.tribunnews.com/2023/07/17/hadang-rombongan-komisi-iv-dpr-ri-warga-pesisir-morodemak-sampaikan-aspirasi-ini>
3. <https://banyumas.tribunnews.com/2023/07/20/dpr-soroti-breakwater-morodemak-yang-mangkrak-kewenangan-pemprov-jateng>
4. <https://banyumas.tribunnews.com/2023/07/20/pro-kontra-eksploitasi-pasir-laut-untuk-bangun-tol-semarang-demak-dpr-minta-ada-kajian>
5. <https://oohya.republika.co.id/posts/228412/aksi-diam-warga-pesisir-demak-saat-rombongan-dpr-dan-dirjen-prl-kkp-datang-tolak-tambang-pasir-laut>
6. <https://jateng.tribunnews.com/2023/07/18/video-kapal-rombongan-dpr-ri-terjebak-sedimentasi-tengah-laut-morodemak>
7. <https://jateng.tribunnews.com/2023/07/17/kapal-rombongan-dpr-ri-terjebak-di-perairan-demak-lantaran-sedimentasi-dan-pasang-surut>
8. <https://banyumas.tribunnews.com/2023/07/18/cerita-wakil-ketua-komisi-iv-dpr-terjebak-sedimentasi-di-morodemak-maju-mundur-tak-bisa>
9. <https://oohya.republika.co.id/posts/228412/aksi-diam-warga-pesisir-demak-saat-rombongan-dpr-dan-dirjen-prl-kkp-datang-tolak-tambang-pasir-laut>
10. <https://m.caping.co.id/news/detail/12652929>
11. <https://m.caping.co.id/news/detail/12653513>
12. <https://www.youtube.com/watch?v=mC3svn0jAAM>

Pangan

1. <https://www.ayosemarang.com/semarang-raja/779512741/naik-sejak-lebaran-harga-ayam-di-kota-semarang-belum-turun-sampai-sekarang>
2. <https://kuasakata.com/read/berita/75351-dpr-ri-sebut-harga-daging-ayam-di-semarang-masih-tinggi-mencapai-rp-40-ribu>
3. <https://jateng.akurat.co/datang-ke-pasar-karangayu-anggota-dpr-ri-sebut-harga-daging-ayam-tinggi>

4. <https://jateng.tribunnews.com/2023/07/18/harga-daging-ayam-di-semarang-masih-tinggi-tembus-rp-40-ribu-per-kilogram>
5. <https://www.antaraneews.com/video/3641163/masuk-pasar-karangayu-legislator-pastikan-harga-kebutuhan-pokok>
6. <https://joglojateng.com/2023/07/20/komisi-iv-dpr-ri-sidak-pasar-karangayu/>
7. <https://lenterajateng.com/harga-bawang-putih-meroket/>

LAMPIRAN DOKUMENTASI

LAHAN KEDELAJ DESA BANJARSARI KEC. GAJAH KAB. DEMAK



SEDIMENTASI LAUT DI PELABUHAN PERIKANAN MORODEMAK





BENCANA ABRASI DAN BANJIR ROB DI DESA BEDONO



PASAR KARANG AYU





PEJABAT PENDAMPING KUNJUNGAN KERJA RESES

BUPATI DEMAK	dr. Hj. Eisti'anah, S.E
WALIKOTA SEMARANG	Hevearita Gunaryanti Rahayu
BAPANAS	Deputi bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Dr. Drs. Nyoto Suwignyo, MM
KEMENTERIAN PERTANIAN	Direktur Jenderal Tanaman Pangan Dr. Ir. Suwandi, M.Sc Direktur Perlindungan Perkebunan Ir.Hendratmojo Bagus Hudoro, M.Sc Direktur Kesmavet Drh.Syamsul Maarif Direktur Polbangtan Dr.Bambang Sudarmanto, S.PT, MP Kepala BPSIP Dr Ir Syamsudin,.M.SC
KLHK	Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan Ir. Dyah Murtiningsih, M.Hum Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Tulus Laksono, SH Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Jawa Dr. drh. Abdul Muin, M,Si Kepala Balai PDAS Pemali Jratun Rochimah Nugrahini, S.Hut, M.Si Kepala BPDAS Solo Dr. Markus Octavianus Plt Kepala Balai TN Gunung Merapi Ir. Nurpana
KKP	Dirjen Pengelolaan Ruang Laut Irjen. Pol. Drs. Victor Gustaf Manoppo, M.H. SAM KHAL (Staf Ahli Menteri Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga KKP) Ir. Ishartini

	<p>Direktur Kepelabuhanan Perikanan Ir Tri Aris Wibowo, M.Si</p> <p>Kepala Balai Besar Penangkapan Ikan Semarang Bagus Oktori</p> <p>Direktur Logistik Berny Subkhi</p> <p>Kepala Balai KIPM Semarang Sokhib</p>
PERUM BULOG	<p>Direktur Human Capital Purnomo Sinar Hadi</p> <p>Pemimpin Wilayah Jateng Akhmad Kholisun</p>
PIHC	<p>Wakil Direktur Utama Nugroho Christijanto</p> <p>SVP PSO Wilayah Timur Agus Susanto</p>
RNI	<p>Direktur Pengembangan dan Pengendalian Usaha Dirgayuza Setiawan</p>